

# **KINERJA APARATUR DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI KABUPATEN KETAPANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN KENDAWANGAN)**

Oleh:

**Yuli Riski An Nisaa**

NIM. E42011050

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

*E-mail : [yuliriski\\_annisaa@ymail.com](mailto:yuliriski_annisaa@ymail.com)*

## **Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Ketapang khususnya di Kantor Camat Kendawangan, dengan memfokuskan kepada penyusunan RKA-SKPD oleh Kantor Camat Kendawangan. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan karena penyusunan RKA-SKPD di Kantor Camat Kendawangan mengalami keterlambatan penyampaian pada Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, ini dilihat dari hasil kerja yang dilaksanakan oleh aparatur yang terbentuk dalam sebuah tim penyusunan RKA-SKPD yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa panduan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Hasil dari penelitian ini adalah tim pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sudah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur namun yang menjadi kendalanya adalah masih adanya beberapa aparatur yang belum mengerti mengenai penyusunan RKA-SKPD dan belum menguasai komputer. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan aparatur.

Kata-kata kunci: Anggaran, Aparatur, Kuantitas Kerja, Kualitas Kerja dan Ketepatan Waktu.

## **THE PERFORMANCE OF WORK PLAN COMPILED AND BUDGET OFFICERS IN DISTRICT OF KETAPANG (CASE STUDY IN THE SUBDISTRICT OFFICE OF KENDAWANGAN)**

### **Abstract**

This skripsi is intended to know how the compile process of work plan and budget in the district of Ketapang, especially in the Kendawangan subdistrict office, with focused on the compile of RKA-SKPD by the Kendawangan subdistrict office. This Skripsi is based on the issues because the compile process of RKA-SKPD in the Kendawangan subdistrict office is delayed to report to the financial affairs as financial management officer of district Ketapang, it's knowingly based on the work results of the officers which form as a RKA-SKPD compiler team. This research is uses the descriptive research type with the qualitative approach. The research is conducted by using technique and appliance of data collecting in the form of tools interview guidance to get complete and valid data. The result of this research is the performance of the implementation compiler work plan and budget team is doing a good enough and based on the procedure, but the problem is some officer is still not understand about how to compile RKA-SKPD dan still can't using computer. That happened because their education level is still too low, and the position replacement is not based on the officers skills.

*Keywords: Budget, Officer, Quantity of Work, Quality of Work and Timeliness.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, merupakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada Kepala Daerah untuk mengelola keuangan daerah yang merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan maka dibutuhkan sebuah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mampu mewujudkan sebuah laporan keuangan yang memadai serta dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan disiplin anggaran atas beban APBD Kabupaten Ketapang.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistem yang paling penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimulai dari penganggaran sampai dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Produk hukum terbaru yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan gambaran aktivitas pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakatnya dalam kurun waktu satu tahun. Namun dalam APBD tersebut tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kendala-kendala yang seharusnya menjadi acuan untuk penyempurnaan APBD tahun-tahun berikutnya. Sebagian sumber dana dalam APBD adalah dana dari pendapatan asli daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setiap Tahun Penyusunan APBD terus menerus diperbaharui sebagai langkah pembaharuan dalam manajemen keuangan daerah agar lebih baik, lebih terarah dan lebih efisien..

Perencanaan anggaran keuangan daerah menjadi penting karena sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Aspek perencanaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta

distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD seharusnya dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Saat ini pelaksanaan didalam penyusunan RKA-SKPD harus sesuai dengan proses dan mekanisme yang telah ada. Ini ditujukan untuk terlaksananya transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran. Berjalannya proses penyusunan RKA-SKPD dengan baik dan sesuai akan memberikan hasil kerja yang sesuai dengan harapan didalam sebuah pemerintahan. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) akan menghasilkan pencapaian tujuan yang baik apabila dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur. RKA-SKPD yang tidak berjalan dengan baik akan memberikan dampak yaitu tidak efektif dan efisiennya proses kerja yang telah dijalankan yang dapat dilihat dengan pelaksanaan dilapangan

belum berhasil sesuai harapan yang diinginkan, terhambatnya proses penyusunan APBD, serta dampak lainnya adalah sebuah organisasi pemerintahan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Melihat dari pedoman penyusunan RKA-SKPD, pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD disampaikan paling lambat pada bulan Agustus waktu berjalan.

Pada kenyataannya, saat ini proses penyusunan RKA-SKPD di Kabupaten Ketapang masih belum berjalan tepat waktu. Penyusunan RKA-SKPD mengalami keterlambatan penyampaian padahal untuk selanjutnya akan dibuat penjabaran APBD. Keterlambatan tersebut karena beberapa SKPD yang dalam hal ini di Kantor Camat Kendawangan belum tepat waktu menyampaikan RKA. Kekurangan yang terdapat dalam proses penyusunan RKA-SKPD ini dapat dilihat dari beberapa masalah yang bersumber dari sumber daya manusia, fasilitas dan pelaksanaan yang belum sesuai prosedur. Sumber daya manusia yang ada di Kantor Camat Kendawangan Kabupaten Ketapang masih rendah terbukti dari segi ketepatan waktu dalam penyampaian RKA-SKPD masih belum tepat waktu. Salah satu penyebab masih rendahnya sumber daya manusia di Kantor Camat Kendawangan ditunjukkan dengan jumlah SDM yang terbatas dan

kualitas kompetensi yang kurang sehingga pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan juga menjadi faktor keterlambatan dalam penyusunan RKA-SKPD ini.

Kemudian dapat dilihat dari segi kuantitas aparatur di Kantor Camat kendawangan dalam penyusunan RKA-SKPD masih belum terselesaikan secara keseluruhan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, masih terjadi tumpang tindih tanggung jawab dalam penyusunan RKA.

Hal lainnya yang menggambarkan kekurangan dari aparatur di Kantor Camat Kendawangan Kabupaten Ketapang adalah dari segi kualitas dimana berkas penyusunan RKA-SKPD pada tahun tertentu ada yang tidak lengkap isinya bahkan berkas tersebut sudah tidak diketahui tempat penyimpanannya karena lemahnya tanggung jawab yang ada dari aparatur itu sendiri, ini menunjukkan bahwa pengerjaan tugas yang diberikan terjadi ketidaktepatan dan tidak terinci. Dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Kendawangan, jumlah komputer dan printer yang menunjang proses penyusunan RKA-SKPD masih dikatakan kurang. Ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan seharusnya mampu dilaksanakan demi tercapainya hasil kerja yang baik dan tepat capaian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah

yang ada di Kantor Camat Kendawangan dengan judul *“Kinerja Aparatur Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus di Kantor Camat Kendawangan)”*.

## **2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Fokus untuk penelitian ini adalah “Kinerja Aparatur Daerah dalam Penyusunan RKA-SKPD di Kantor Camat Kendawangan” yang akan dikaji menurut indikator oleh Agus Dharma (2003: 355) yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu.

## **3. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dibuatlah sebuah rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu: “Bagaimana kinerja aparatur daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Ketapang (Studi Kasus di Kantor Camat Kendawangan)?

## **4. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah alasan dilakukannya suatu penelitian. Tujuan erat kaitannya dengan rumusan masalah

penelitian yang ada. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur daerah di Kantor Camat Kendawangan Kabupaten Ketapang sehingga dapat tepat waktu menyampaikan RKA-SKPD.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan RKA- SKPD di Kantor Camat Kendawangan Kabupaten Ketapang.

## 5. Manfaat Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan terutama berkenaan dengan Kinerja Aparatur Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Ketapang pada tahun selanjutnya.

### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan yang digunakan untuk memberi manfaat terkait dengan masalah Kinerja Aparatur Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

## B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

### 1. Kerangka Teori

Dalam berbagai literature yang ada terdapat pengertian tentang kinerja yang beragam. Menurut Sulistyani (2003:223) “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Selanjutnya menurut Mangkunegara (2005:67) mengemukakan pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Hasil kerja yang dimaksudkan dapat diukur dari segi jumlah yang hendak dicapai dan mengukur sejauh mana perkerjaan dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan hasil yang baik. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya (Sinambela, 2012:5).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas pengertian kinerja menurut peneliti adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya,

dimana tugas yang dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab diberikan kepadanya.

Selain pengertian kinerja yang telah dijelaskan diatas, terdapat acuan yang dijadikan rujukan peneliti untuk menggambarkan kinerja aparatur. Kinerja aparatur yang diharapkan dalam penelitian akan dapat menggambarkan lebih jelas dengan menggunakan acuan yang ditetapkan, yakni menurut Agus Dharma dalam bukunya Manajemen Supervisi (2003:355) mengatakan “hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan

ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengambil objek penelitian di Kantor Camat Kendawangan Kabupaten Ketapang. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti dapat mengetahui secara langsung masalah yang terjadi di lapangan, memberikan jawaban-jawaban yang bukan sekedar angka tetapi juga penjelasan yang lebih mendalam mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan masalah yang terjadi sehingga kedepannya dalam penyusunan RKA-SKPD berjalan tepat waktu.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan panduan wawancara dan teknik observasi yaitu peneliti melihat secara langsung semua aktivitas aparatur di Kantor Camat Kendawangan menggunakan panduan observasi berupa ceklis.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan mereduksi data peneliti dapat memilh hal-hal pokok dari data yang didapatkan untuk selanjutnya

dirangkum dan disajikan kedalam sebuah kesimpulan dari hasil peneliti dilapangan. Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah trigulasi sumber. Hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Camat Kendawangan. Kemudian peneliti mengumpulkan semua data yang didapat dan dikelompokkan sesuai dengan indikator yang menjadi acuan peneliti. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Data yang telah ada dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data utama yaitu wawancara dengan narasumber.

Data yang telah tersebut kemudian diberikan analisis yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan data-data yang ada, peneliti akan menjelaskan setiap aspek dari kinerja aparatur.

#### **1. Kuantitas**

Kuantitas dapat dilihat dari jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.

Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, kuantitas aparatur di Kantor Camat Kendawangan dapat dikatakan cukup baik, meskipun dalam proses penyusunan RKA-SKPD belum terlaksana tepat pada target penyusunan. Tim penyusunan RKA-SKPD di Kantor Camat Kendawangan masih belum menentukan target kerja yang harus diselesaikan sehingga pekerjaan menjadi kelebihan batas waktu dari Surat Edaran Bupati Kabupaten Ketapang.

#### **2. Kualitas**

Kualitas kerja aparatur berkaitan dengan mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitas mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran. Oleh karena itu untuk mengetahui baik tidaknya kinerja aparatur di Kantor Camat Kendawangan dapat dilihat dari kinerja aparatur melalui penilaian kualitas ini.

Dilihat dari segi kualitas kerja aparatur di Kantor Camat Kendawangan dapat dikatakan cukup baik karena aparatur yang ada telah berusaha menyelesaikan

tugas sesuai dengan prosedur. Namun, jika dilihat dari macam-macam kendala yang ditemukan peneliti ini menunjukkan bahwa aparatur yang ada masih mengalami kesulitan dalam penyusunan RKA-SKPD. Sebab aparatur yang menjadi tim penyusunan RKA-SKPD tidak semuanya menguasai proses penyusunan. Oleh karena itu hanya 1 aparatur saja yaitu bendahara Camat yang mengerjakan penyusunan RKA-SKPD tiap tahunnya.

### 3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Dari hasil penelitian, dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas setiap aparatur dari pengamatan peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan, dilihat dari beberapa aparatur yang belum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Dari pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan penyampaian RKA-SKPD ini tidak bisa terlambat sedikit saja karena akan berpengaruh pada anggaran yang diajukan, dimana di Bagian Keuangan pada saat musim pengumpulan RKA-SKPD banyak tim-tim yang sudah menyampaikan RKA

berbondong-bondong menghadap Kepala Sub bagian Anggaran untuk berbicara mengenai anggaran yang mereka ajukan agar disetujui semua. Ini merupakan fenomena yang selalu ada pada saat proses pengumpulan RKA-SKPD oleh masing-masing SKPD.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan masalah di atas, peneliti membuat kesimpulan mengenai kinerja aparatur di Kantor Camat Kendawangan, yaitu:

- 1) Kuantitas kerja aparatur di Kantor Camat Kendawangan berjalan cukup baik. Pada semua pekerjaan telah dapat diselesaikan dengan baik dan jumlahnya terpenuhi. Namun masih ada kegiatan seperti dalam penyusunan RKA-SKPD yang belum dapat dipenuhi semuanya karena tingkat kompetensi dan jumlah pegawai yang mengerti dalam penyusunan RKA-SKPD masih terbilang kurang dan belum menguasai tugasnya. Hal lain yang menjadi penghambat adalah jumlah komputer yang kurang dan jarak antara Kantor Camat Kendawangan dengan pusat kota yang cukup jauh untuk ditempuh.

- 2) Dilihat dari segi kualitas kerja aparatur di Kantor Camat Kendawangan menunjukkan bahwa aparatur yang ada masih mengalami kesulitan dalam penyusunan RKA-SKPD. Sebab aparatur yang menjadi tim penyusunan RKA-SKPD tidak semuanya menguasai proses penyusunan. Oleh karena itu hanya 1 aparatur saja yaitu bendahara Camat yang mengerjakan penyusunan RKA-SKPD tiap tahunnya. Kemudian aparatur yang berwenang dalam penyusunan RKA-SKPD juga tidak mau belajar dan memberikan tugas mereka kepada aparatur lain yang bersedia. Ini menunjukkan bahwa kualitas dari aparatur yang menyusun RKA-SKPD masih dipandang kurang. Namun secara keseluruhan aparatur yang ada di Kantor Camat Kendawangan sudah cukup baik dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Ketepatan Waktu Dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas setiap aparatur dari pengamatan peneliti menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan, dilihat dari beberapa aparatur yang belum menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki. Dalam penyusunan RKA-SKPD telah diberi surat edaran oleh

Bagian Keuangan untuk menyelesaikan penyusunan RKA-SKPD hingga bulan Agustus waktu berjalan, tetapi oleh pihak Camat masih mengalami keterlambatan penyampaian RKA-SKPD sampai pada bulan September dan Oktober.

## 2. Saran

Melihat dari beberapa hal yang disampaikan peneliti dalam simpulan laporan penelitian ini, berikut merupakan hal-hal yang dapat disarankan untuk Kinerja Aparatur Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Ketapang:

1. Kuantitas, untuk dapat menyelesaikan semua pekerjaan secara keseluruhan, maka aparatur yang ada sebaiknya belajar dan diberikan pelatihan mengenai proses penyusunan RKA-SKPD yang dimana dalam penyusunan ini masih belum dipahami oleh tim penyusunan di Kantor Camat Kendawangan. Setelah mendapatkan pelatihan diharapkan aparatur dapat memahami dan menguasai secara baik dan benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD berjalan lancar. Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana Kantor seperti komputer dan printer masih harus

ditambah lebih banyak. Untuk setiap aparatur yang menyusun RKA-SKPD seharusnya memiliki 1 komputer yang akan lebih memudahkan dalam menyusun RKA-SKPD. Kemudian, aparatur yang termasuk dalam tim penyusunan RKA-SKPD harus menguasai komputer karena untuk anggaran ini berhubungan dengan penginputan data dalam penyusunan RKA-SKPD.

2. Kualitas, dalam proses penyusunan RKA-SKPD sebaiknya dilaksanakan oleh aparatur yang menguasai secara keseluruhan proses penyusunan RKA-SKPD. Untuk selanjutnya dalam perekrutan aparatur yang akan datang diharapkan menentukan dan merekrut aparatur pada suatu jabatan tertentu berdasarkan kemampuan yang dimiliki, maksudnya adalah aparatur yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan ahli pada bidang anggaran, sehingga kedepannya tidak ada lagi tumpang tindih tugas melainkan kaan bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan hasil yang memuaskan.
3. Ketepatan Waktu, Penyusunan RKA-SKPD merupakan proses penyusunan anggaran Camat untuk periode 1 tahun, dimana dalam penyusunan ini sudah

dibagikan kepada setiap SKPD berupa Surat Edaran (SE) untuk penyusunan RKA-SKPD paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan untuk pengumpulan RKA-SKPD kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Setiap SKPD seharusnya dapat mengerjakan dan mengumpulkan RKA pada bulan yang ditentukan dengan lebih mengendalikan proses pengerjaan yang lebih maksimal dan tidak menambah waktu yang telah ditetapkan. Tim penyusunan RKA-SKPD sebaiknya menentukan target pengerjaan setiap poin-poin dalam penyusunan RKA-SKPD dalam waktu tertentu, sehingga target yang dicapai tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh PPKD.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LaskBang.
- Baridwan, Zaki. 1999. *Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode*, Penerbit Akademi Akuntansi KPN, Yogyakarta.

Darise, Nurlan. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*.

Dharma, Agus. 2003. *Manajemen Supervisi*. Jakarta. Rajawali Pers.

Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja-Filsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP-AMP YKPM. Yogyakarta.

Mangkunegara, AA. Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Keempat Belas. Bandung : Alfabeta.

----- . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Syafiee, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung. Bandar Maju.

Sinambela, Lijan poltak. 2012. *Kinerja Pegawai*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia : konsep, teori dan pengembangan dalam konteks organisasi publik*. Graha Ilmu.

Suripto, Chabib Soleh. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Taufiq Ritonga, Irwan. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Kedua. Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Tohardi. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Veithzal Rivai & Ahmad Fawzi Mohd Basri. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wsistiono, Sadu. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa*. Bandung: Fokus Media.

#### **Peraturan Pemerintah:**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Fusmedia, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pedoman Penyusunan APBD TA. 2010*, Penerbit Departemen Dalam Negeri, 2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Departemen Dalam Negeri, 2005.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Atas Permendagri Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Jakarta, 2007.

Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI Nomor 24 Tahun 2005), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

**Skripsi :**

Fauziah, 2011. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Bagian Kepegawaian Daerah)*. Skripsi.

Rahmadani, Eka Sari, 2013. *Kinerja Aparatur Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Makro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pontianak*. Skripsi.

Sisianto, Depi, 2014. *Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tinting Bonyok Kecamatan Sekadau Hulu*. Skripsi.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yuli Riski An Nisaa  
NIM / Periode Lulus : E42011050 / 2015  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [yuliriski\\_annisaa@gmail.com](mailto:yuliriski_annisaa@gmail.com) / 085252608998

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA APARATUR DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI  
KABUPATEN KETAPANG (STUDI KASUS DI KANTOR CAMAT KENDAWANGAN)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

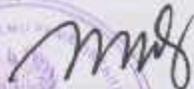
- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal IP

  
Dr. H. Wijaya Kusuma, MA  
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal: 24 Agustus 2015

  
(Yuli Riski An Nisaa)  
E.42011050